

**ANALISIS RASIO KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2008-2012**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh:
Astriana Nabila Muhibtari
10412144020

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2008-2012**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh:
Astriana Nabila Muhibtari
10412144020

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2008-2012**

PROPOSAL SKRIPSI

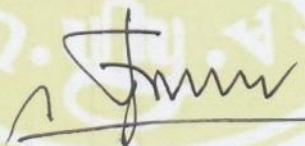
Oleh:

ASTRIANA NABILA MUHIBTARI

10412144020

Telah diseminarkan oleh
Nara Sumber Skripsi Program Studi Akuntansi
Jurusan Pendidikan Akuntansi
Pada tanggal 2 Juni 2014

Dosen Pembimbing,



Abdullah Taman, M.Si., Ak.
NIP. 19630624 199001 1 001


Wakil Dekan I

Dr. Moerdiyanto, M.Pd., MM.

NIP. 19580507 198303 1 001

PERSETUJUAN

**ANALISIS RASIO KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2008-2012**

SKRIPSI

Oleh:

ASTRIANA NABILA MUHIBTARI

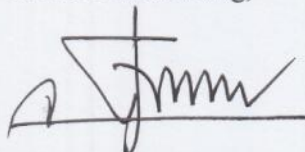
10412144020

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal 20 Agustus 2014

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing,



Abdullah Taman, M.Si., Ak.
NIP. 19630624 199001 1 001

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS RASIO KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2008-2012

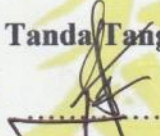
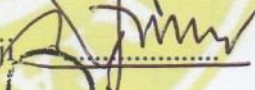

SKRIPSI

Oleh:


ASTRIANA NABILA MUHIBTARI
10412144020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Jurusan Pendidikan
Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Yogyakarta,
pada tanggal 1 September 2014 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Sukirno, M. Si., Ph. D.	Ketua Penguji		16-09-2014
Abdullah Taman, M.Si., Ak.	Sekretaris Penguji		16-09-2014
Ngadirin Setiawan, SE., MS.	Penguji Utama		15-09-2014

Yogyakarta, 17 September 2014
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan


Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

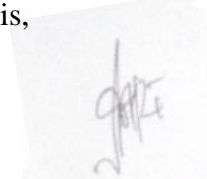
Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Astriana Nabila Muhibtari
NIM : 10412144022
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : **ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2008-2012**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 September 2014
Penulis,



Astriana Nabila Muhibtari
NIM. 10412144020

MOTTO

“Sungguh di dalam kesukaran ada kemudahan.”

Al-Inshirah 5

“Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”

An-Najm 40-41

“Tak ada sesuatu pun yang pernah berhasil dengan baik jika pelaksanaannya tidak dibantu oleh semangat yang kuat.”

Nietzsche

P E R S E M B A H A N

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Aris Nugroho dan Ibu Priyatinah.
2. Kakak-kakakku, Ainun Novita Okurisa dan Alfin Satria Anggit Pribadi.
3. Jurusan Akuntansi.
4. Universitas Negeri Yogyakarta.

**ANALISIS RASIO KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2008-2012**

Oleh :
ASTRIANA NABILA MUHIBTARI
10412144020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2008-2012.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studikamus dengan pendekatan statistik deskriptif. Data yang diolah adalah Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008-2012 yang didapatkan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang. Analisis yang digunakan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja. Sedangkan analisis yang digunakan untuk menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah adalah dengan menghitung *Share* dan *Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah Kota Magelang berada pada kriteria instruktif. Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kota Magelang masih kurang, namun, tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang terbilang sangat efektif dan tingkat Efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang terbilang sangat efisien. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan keseimbangan antarbelanja belum seimbang. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Magelang masih belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan *Share* dan *Growth*, posisi Kota Magelang berada pada kuadran II. Dilihat dari hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kota Magelang, Kemampuan Keuangan Kota Magelang tergolong tinggi.

Kata kunci: Analisis Rasio Keuangan APBD, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012” dengan lancar dan baik. Tugas Akhir Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan lancar dan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd., M. A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Prof. Sukirno, M.Si., Ph.D., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Dhyah Setyorini, M.Si., Ak., Koordinator Program Studi Akuntansi, dosen pembimbing akademik.
5. Abdullah Taman, M.Si., Ak., Dosen pembimbing yang telah memberikan pikiran, waktu, dan tenaganya dalam mengarahkan, membimbing, dan memberi masukan Tugas Akhir Skripsi.

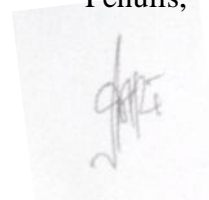
6. Ngadirin Setiawan, SE., MS., Dosen Nara Sumber yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberi masukan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama ini.
8. Kedua orangtua, Bapak Aris Nugroho dan Ibu Priyatinah, serta kakak-kakakku Ainun Novita Okurisa dan Alfin Satria Anggit Pribadi yang telah memberikan dukungan semangat, moral, dan material selama penulis menuntut ilmu dan dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
9. Sahabat-sahabatku, Renny Natalia Rambang dan Tri Maya Apriyasyang selalu memberikan semangat, bantuan, hiburan, dukungan, dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis terpacu untuk menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi.
10. Teguh Hadi Prasetyo, M. Cholid Wildan, Aziz Setiawan, Azis Muhamad Subhan, Mirza Nugraha, Fajar Arifianto, Antonyella Papina, Anna Pratiwi, Risma Budi Prihanisa, dan segenap keluarga besar Akuntansi B 2010 yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan terima kasih atas kebahagiaan yang telah kalian berikan selama masa perkuliahan.
11. Dito Anugerah Saputera, Dini Alfiodita, Ditya Jati W, Erlina Laili, Elina Yuanita, Gity Wulang Mandini, Galant Nanta Aditya, Debby Yunita Saputri, Seni Nur Rahmawati, Deseptiningtyas, Mentari Endah Prastiwi, Andhi Aliem Wicaksono, M. Sany Ustman, Dewi Utari Wahyuningtyas, dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu mengembalikan semangat untuk mengerjakan Tugas Akhir Skripsi.

12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena, itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan Tugas Akhir Skripsi ini. Harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 1 September 2014

Penulis,



Astriana Nabila Muhibtari

NIM. 10412144020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7

	Halaman
BAB II. KAJIAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN.....	9
A. Kajian Teoritis	9
1. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	9
2. Laporan Keuangan	12
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
4. Analisis Laporan Keuangan.....	34
B. Penelitian yang Relevan	43
C. Kerangka Pemikiran.....	49
D. Pertanyaan Penelitian	52
BAB III. METODE PENELITIAN	54
A. Tempat dan Waktu Penelitian	54
B. Desain Penelitian	54
C. Teknik Pengumpulan Data	55
D. Teknik Analisis Data	55
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Kota Magelang	62
1. Kondisi Geografis	62
2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang	64
B. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang	65
1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah	66
2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah	84

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian	37
2. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal	38
3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	39
4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	39
5. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran	41
6. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah.....	43
7. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian	56
8. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal	57
9. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	58
10. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	58
11. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran	60
12. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah.....	61
13. Rasio Kemandirian APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012	66
14. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012	70
15. Rasio Efektivitas APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012	73

	Halaman
16. Rasio Efisiensi APBD Kota Magelang	
Tahun Anggaran 2008-2012	76
17. Rasio Belanja Tidak Langsung APBD Kota Magelang	
Tahun Anggaran 2008-2012	79
18. Rasio Belanja Langsung APBD Kota Magelang	
Tahun Anggaran 2008-2012	81
19. <i>Share</i> APBD Kota Magelang	
Tahun Anggaran 2008-2012	84
20. <i>Growth</i> APBD Kota Magelang	
Tahun Anggaran 2008-2012	85
21. Indeks Elastisitas APBD Kota Magelang	
Tahun Anggaran 2008-2012	87
22. Indeks <i>Share</i> APBD Kota Magelang	
Tahun Anggaran 2008-2012	88
23. Indeks <i>Growth</i> APBD Kota Magelang	
Tahun Anggaran 2008-2012	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran Rata-rata <i>GROWTH</i> (%)	41
2. Kerangka Pemikiran.....	51
3. Peta Kota Magelang	62
4. Rasio Kemandirian APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012	67
5. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012	70
6. Rasio Efektivitas APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012	73
7. Rasio Efisiensi APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012	76
8. Rasio Belanja Tidak Langsung APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012	79
9. Rasio Belanja Langsung APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Indeks Elastisitas APBD Kota Magelang	
Tahun Anggaran 2008-2012	98
2. Indeks <i>Growth</i> APBD Kota Magelang	
Tahun Anggaran 2008-2012	99
3. Indeks <i>Share</i> APBD Kota Magelang	
Tahun Anggaran 2008-2012	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya.

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Menurut Mahmudi (2010: 2) terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas kinerja keuangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Terdapat dua alasan utama mengapa Pemerintah Daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu:

1. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kinerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*),

yaitu pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah kepada pegawai pemda-pemda dan DPRD.

2. Dilihat dari sisi pemakaian eksternal, laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat

keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk menghitung Kemampuan Keuangan Daerah, yaitu dengan cara menghitung *Share* dan *Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah. Dengan berdasarkan pada ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka penulis

mengambil judul: **"Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi adalah meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan.

C. Pembatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan data dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang pada tahun anggaran 2008-2012. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dilihat dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja, sedangkan pengukuran Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang dilihat dari hasil perhitungan *Share* dan *Growth* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Dari keseluruhan perhitungan dibuatlah grafik untuk mempermudah

penarikan kesimpulan secara deskriptif berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang pada tahun anggaran 2008-2012.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang selama Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012?
2. Bagaimanakah Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang diukur melalui *Share* dan *Growth* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) selama Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian

Belanja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang selama Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012.

2. Untuk menilai Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang diukur melalui *Share* dan *Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) selama Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai acuan dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kota Magelang dari waktu ke waktu selama periode 5 tahun, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode-periode berikutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban APBD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Akuntansi Sektor Publik.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan bagaimana cara menghitung analisis laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Kota Magelang dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN

A. Kajian Teoritis

1. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Akuntabilitas menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan penting untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat Pemerintah Daerah untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Tidak hanya itu, pengukuran kinerja juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud.

Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyahul Ulum, 2009: 19-21).

b. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ihyahul Ulum (2009), antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
- 3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ihyahul Ulum (2009), antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara Objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara Objektif.

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Salah satu alat penting dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi analisis laporan keuangan adalah laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi Tahun 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1) Neraca atau Laporan posisi keuangan pada akhir periode.

Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- a) Aset tetap;
- b) Properti investasi;
- c) Aset tidak berwujud;
- d) Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (h) dan (i));
- e) Investasi dengan menggunakan metode ekuitas;
- f) Aset biologik;
- g) Persediaan;
- h) Piutang dagang dan piutang lainnya;

- i) Kas dan setara kas;
- j) Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual;
- k) Utang dagang dan terutang lainnya;
- l) Kewajiban diestimasi;
- m) Laibilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (k) dan (l));
- n) Laibilitas dan aset untuk pajak kini;
- o) Laibilitas dan aset pajak tangguhan;
- p) Laibilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual;
- q) Kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan
- r) Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2) Laporan laba rugi komprehensif.

Entitas menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode:

- a) Dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif, atau
- b) Dalam bentuk dua laporan:
 - i) Laporan yang menunjukkan komponen laba rugi (laporan laba rugi terpisah); dan

- ii) laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain (laporan pendapatan komprehensif)

Laporan laba rugi komprehensif, sekurang-kurangnya mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut selama suatu periode:

- a) Pendapatan;
- b) Biaya keuangan;
- c) Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan *joint ventures* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
- d) Beban pajak;
- e) Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
 - i) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan
 - ii) Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan;
- f) Laba rugi;
- g) Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifatnya (selain jumlah dalam huruf (h));
- h) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan *joint ventures* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; dan

i) Total laba rugi komprehensif..

3) Laporan perubahan ekuitas.

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a) Total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali;
- b) Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif
- c) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
 - i) Laba rugi;
 - ii) Masing-masing pos pendapatan komprehensif lain; dan
 - iii) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

4) Laporan arus kas.

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan

kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

5) Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Struktur catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu
 - b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan
 - c) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
- 6) Laporan posisi keuangan awal periode komparatif sajian akibat penerapan retrospektif, penyajian kembali, atau reklasifikasi pos-pos laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen pokok laporan keuangan Pemerintah Pusat/ Daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/ Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/ Daerah selama periode tertentu.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

b. Peranan Pelaporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-undangan. Suatu entitas pelaporan wajib melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

c. Tujuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan pemanfaatan bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan serta hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Moh. Mahsun, dkk, 2011: 81, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Halim (2012), pada era orde lama terdapat pula definisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong, 1962: 81, yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran

tadi. APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Pada era reformasi, bentuk dan susunan APBD mengalami dua kali perubahan. Pada awalnya, susunan APBD (berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1975) terdiri atas Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. Anggaran Rutin dibagi menjadi Pendapatan dan Belanja Rutin, demikian pula Anggaran Pembangunan dibagi menjadi Pendapatan dan Belanja Pembangunan. Susunan tersebut kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pada tahun 1984-1988. Dengan adanya peraturan tersebut, susunan dan bentuk APBD tidak lagi terbagi atas Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan, namun terbagi menjadi Pendapatan dan Belanja. Pendapatan terbagi lagi menjadi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembangunan, dan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP), sedangkan belanja terbagi menjadi Belanja Rutin dan Pembangunan.

Perubahan kedua era pra reformasi pada tahun 1998 terjadi pada bagian pendapatan dari daerah. Jika pada bentuk sebelumnya

pendapatan dari daerah terbagi menjadi empat, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu, Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, dan Sumbangan dan Bantuan, maka pada bentuk yang baru, Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Sumbangan dan Bantuan dimasukkan ke dalam satu bagian, yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi. Karakteristik APBD pada era prareformasi adalah:

- 1) APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan kepala daerah (Pasal 30 UU Nomor 5 tahun 1975).
- 2) Pendekatan yang dipakai dalam menyusun anggaran adalah pendekatan *line-item* atas pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini, anggaran disusun berdasar jenis penerimaan dan pengeluaran. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas setiap pengeluaran.
- 3) Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada menteri dalam negeri untuk Pemda tingkat I dan kepada gubernur untuk Pemda tingkat II, jadi pertanggungjawaban bersifat vertikal.
- 4) Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/

audit terhadap APBD bersifat pengawasan pendapatan dan pengeluaran daerah. Pengawasan tersebut tidak memperhitungkan pertanggungjawaban dari aspek lain, misalnya aspek kinerja.

- 5) Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan hasil program (untuk proyek-proyek daerah).
- 6) Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan *stelsel kameral* (tata buku anggaran). Menurut sistem pembukuan ini penyusunan anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan mempengaruhi. Karena tujuan pembukuan keuangan daerah di era pra reformasi adalah pembukuan pendapatan, maka tata buku yang lebih tepat untuk digunakan adalah *stelsel kameral*. Jika tujuan pembukuan keuangan daerah adalah pembukuan harta, maka tata buku yang tepat untuk digunakan adalah *stelsel komersial*. Pada *stelsel kameral*, diperolehnya pendapatan adalah pada saat penerimaan, sedangkan pembiayaan terjadi pada saat dilakukan pembayaran. Oleh karena itu, *stelsel kameral* ini juga disebut tata buku kas.

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu, APBD dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada

pada APBD di era prareformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak Pemerintah Daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam APBD mungkin terdapat surplus atau defisit. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran.

b. Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.
- 2) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 3) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

- 4) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan prakiraan belanja.
- 5) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- 6) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- 7) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD.
- 8) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- 9) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
- 10) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat

melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

c. Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD antara lain:

1) Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
- b) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- d) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- e) Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- f) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2) Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan penyusunan APBD terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

A) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- ii) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
- iii) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.

b) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
- ii) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).
- iii) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- ii) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
- iii) Penganggaran Dana Otonomi Khusus.
- iv) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID).
- v) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- vi) Penganggaran Dana Transfer lainnya.
- vii) Penganggaran pendapatan kabupaten/ kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi.
- viii) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau

pemerintah kabupaten/ kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

- ix) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- x) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- xi) Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, Objek dan rincian Objek pendapatan Dana Darurat.

2) Belanja Daerah

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

a) Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i) Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai merupakan belanja untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

ii) Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan

kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

iii) Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan belanja untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

b) Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i) Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

ii) Belanja Bunga.

Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*Principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

iii) Belanja Subsidi.

Belanja Subsidi merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

iv) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Hibah merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

v) Belanja Bagi Hasil Pajak.

Belanja Bagi Hasil Pajak merupakan belanja untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan

provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

vi) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.

vii) Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3) Surplus/ Defisit APBD.

- a) Penerimaan Pembiayaan, semua penerimaan yang ditujukan untuk menutup defisit APBD:

- i) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - ii) Pencairan dana cadangan;
 - iii) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - iv) Penerimaan pinjaman daerah;
 - v) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - vi) Penerimaan piutang daerah.
- b) Pengeluaran Pembiayaan, semua pengeluaran yang ditujukan untuk memanfaatkan surplus APBD:
- i) Pembentukan dana cadangan;
 - ii) Penerimaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
 - iii) Pembayaran pokok utang; dan
 - iv) Pemberian pinjaman daerah.

4. Analisis Laporan Keuangan

Fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tetapi tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan. Untuk membantu mengatasi ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut, maka perlu dibantu dengan Analisis Laporan Keuangan. Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan

keuangan. Untuk menganalisis laporan keuangan, maka diperlukan penguasaan terhadap:

- a. Cara menyusun laporan keuangan itu (proses akuntansi);
- b. Konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan atau akuntansi itu;
- c. Teknik analisisnya;
- d. Segmen, dan sifat bisnis itu sendiri, serta situasi lingkungan ekonomi baik internasional maupun nasional.

Salah satu teknik untuk untuk melakukan Analisis Laporan Keuangan, yaitu dengan melakukan perhitungan Analisis Rasio Keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian. Penelitian ini hanya dibatasi pada perhitungan Rasio Keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008-2012. Analisis Rasio Keuangan digunakan untuk menghitung Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah.

1) Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu :

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\% \quad (1)$$

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipasif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2001 dalam Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011.

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
 - b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
 - c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
 - d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
- b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010), derajat

desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (2)$$

Tabel 2. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM, 1991, dalam I Dewa Gde Bisma Dan Hery Susanto, 2010

c) Rasio Efektivitas

Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\% \quad (3)$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2010.

d) Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil Rasio Efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (4)$$

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan(%)	Kriteria
Di atas 40	Tidak Efisien
31 – 40	Kurang Efisien
21 – 30	Cukup Efisien
10 – 20	Efisien
Di bawah 10	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi, 2010.

e) Rasio Kecerahan Belanja

Dalam Mahmudi (2010), Analisis Rasio Kecerahan Belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah

perlu membuat harmonisasi belanja dengan melakukan Analisis Keceragaman Belanja, antara lain:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \quad (5)$$

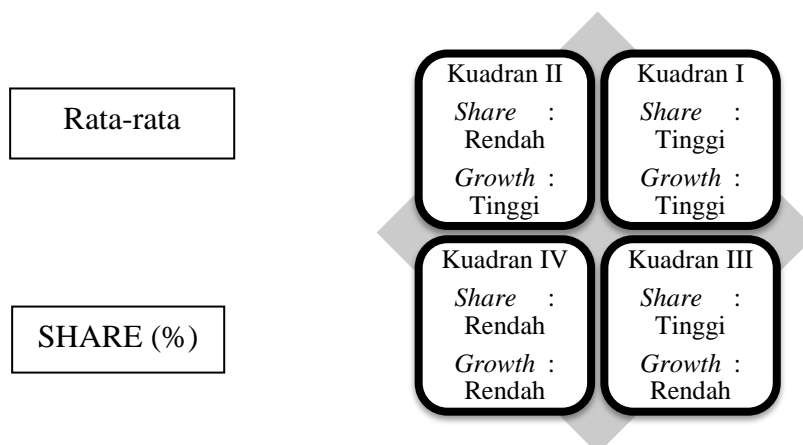
$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \quad (6)$$

Belanja Tidak Langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan. Dilihat dari sudut pandang Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, Belanja Tidak Langsung dikategorikan sebagai biaya kebijakan (*discretionary expense/ expenditure*), sedangkan Belanja Langsung dikategorikan sebagai biaya teknik (*engineered expense/ expenditure*). Analisis proposi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan.

2) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

a) Perhitungan dan Analisis *Share* dan *Growth*

Diawali dengan perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *Share* dan *Growth* kemudian mengklasifikasikan dengan Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran.



Gambar 1. Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran Rata-rata GROWTH (%)

Sumber : Bappenas, 2003

Tabel 5. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam Total Belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber : Bappenas, 2003

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100\% \quad (7)$$

$$Growth = \frac{PAD_i}{PAD_{i-1}} \times 100\% \quad (8)$$

Keterangan:

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah periode i-1

b) Menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Menghitung Indeks Kemampuan Keuangan kemudian mengklasifikasikan dengan metode Indeks Kemampuan Keuangan. Metode Indeks Kemampuan Keuangan merupakan rata-rata hitung dari Indeks Pertumbuhan (*Growth*), Indeks Elastisitas dan Indeks *Share*. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Menyusun indeks untuk setiap komponen IKK dilakukan dengan menggunakan persamaan umum:

$$\text{Indeks X} = \frac{(\text{Nilai x Hasil Pengukuran}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})}{(\text{Nilai x Kondisi Maksimum}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})} \quad (9)$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka persamaan IKK dapat ditulis sebagai berikut:

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3} \quad (10)$$

Keterangan:

X_G = Indeks Pertumbuhan (PAD)

X_E = Indeks Elastisitas (Belanja Langsung Terhadap PAD)

X_s = Indeks *Share* (PAD terhadap APBD)

Tabel 6. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00-0,33	Rendah
0.34-0,43	Sedang
0,44-1,00	Tinggi

Sumber: Bappenas, 2003 dalam I Dewa Gde Bisma Dan Hery Susanto, 2010

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina (2011) yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009”.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Kemandirian Pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih berada pada kemampuan keuangan yang rendah.
- b. Dalam merealisasikan pendapatan daerahnya, Pemerintah Kota Bandung sudah dapat dikategorikan efektif dan efisien.
- c. Berdasarkan perhitungan pada rasio aktivitas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih memprioritaskan anggarannya untuk mencukupi Belanja Rutin dibandingkan Belanja Pembangunan.
- d. Menurut hasil perhitungan DSCR yang memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman adalah Tahun Anggaran 2006, dengan maksimal

angsuran pokok pinjaman sebesar Rp 32.394.659.049,60. Sedangkan untuk Tahun Anggaran yang lain, tidak boleh meminjam lagi karena DSCR di bawah 2,5

- e. Rasio Pertumbuhan PAD menunjukkan angka yang meningkat setiap tahunnya. Begitu juga dengan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Kota Bandung selama Tahun Anggaran 2005-2009 yang mengalami kenaikan, yang kemudian akan mempengaruhi Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2006 sempat terjadi penurunan, namun pada 3 (tiga) Tahun Anggaran berikutnya mengalami peningkatan jumlah nominal belanja pembangunan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina (2011) terletak pada:

- a. Analisis Rasio Keuangan yang digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi.
- b. Periode waktu 5 (lima) tahun anggaran.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina (2011) terletak pada:

- a. Penggunaan Rasio Pertumbuhan, *Debt Service Coverage Ratio*, dan Rasio Aktivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

digunakan pada penelitian Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina (2011), tidak digunakan pada penelitian ini.

- b. Penambahan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Keserasian Belanja, metode yang ditambahkan untuk mengukur Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah, yaitu diukur melalui *Share* dan *Growth* APBD, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK).
 - c. Studi kasus yang diteliti, yaitu Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
 - d. Tahun Anggaran yang digunakan, yaitu 2005-2009 dengan 2008-2012.
2. Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010) yang berjudul “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007”.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Berdasarkan Analisis Kinerja Keuangan Daerah, secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; Ketergantungan Keuangan Daerah sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah sangat kurang. Desentralisasi Fiskal cukup. Efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun Efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

- b. Dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum sumbangan PAD (*share*) terhadap total pendapatan daerah Provinsi NTB TA 2003-2007 masih rendah, namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.
- c. Berdasarkan pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), Provinsi NTB berada pada skala indeks 0,54 selanjutnya diklasifikasikan menurut Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah adalah Provinsi dengan kemampuan keuangan Tinggi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010) terletak pada:

- a. Analisis Rasio Keuangan yang digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Efektivitas dan Efisiensi.
- b. Perhitungan Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah yang diukur melalui *Share* dan *Growth* APBD, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK).
- c. Periode waktu 5 (lima) tahun anggaran.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010) terletak pada:

- a. Penggunaan Rasio Keserasian Belanja yang digunakan pada penelitian ini, tidak digunakan dalam penelitian I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010).

- b. Penggunaan Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yang digunakan pada penelitian I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010), tidak digunakan pada penelitian ini.
 - c. Studi kasus yang diteliti, yaitu Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - d. Tahun Anggaran yang digunakan, yaitu 2003-2007 dengan 2008-2012.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Andita Puspita Wardhani (2011) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005-2010”.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Kinerja Pemerintah Daerah Salatiga dikatakan baik, karena dikatakan efektif dan efisien.
- b. Pemerintah masih bergantung pada Pemerintah Pusat walaupun perkembangan kemandirian tinggi.
- c. Kemampuan PAD kurang untuk pengeluaran rutin.
- d. Rasio Keserasian belum stabil.
- e. Rasio Pertumbuhan Fluktuatif.
- f. Pada Analisis Upaya Fiskal terlihat bahwa elastisitas PAD dengan PDRB berpengaruh positif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Andita Puspita Wardhani (2011) terletak pada Analisis Rasio Keuangan yang digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah yaitu dengan

menggunakan Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Andita Puspita Wardhani (2011) terletak pada:

- a. Metode yang ditambahkan untuk mengukur Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah, yaitu diukur melalui *Share* dan *Growth* APBD, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK).
- b. Penggunaan Rasio Keserasian Belanja dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang digunakan pada penelitian ini, tidak digunakan dalam penelitian Andita Puspita Wardhani (2011).
- c. Penggunaan Analisis Rasio Kemandirian, Analisis Rasio Kemampuan Rutin, Analisis Rasio Keserasian, Analisis Rasio Kebutuhan Fiskal, Analisis Rasio Kapasitas Fiskal, dan Analisis Rasio Upaya Fiskal yang digunakan pada penelitian Andita Puspita Wardhani (2011), tidak digunakan pada penelitian ini.
- d. Studi kasus yang diteliti, yaitu Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.
- e. Tahun Anggaran yang digunakan, yaitu 2005-2010 dengan 2008-2012.
- f. Periode waktu 5 (lima) tahun anggaran dengan 6 (enam) tahun anggaran.

C. Kerangka Pemikiran

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan yang mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

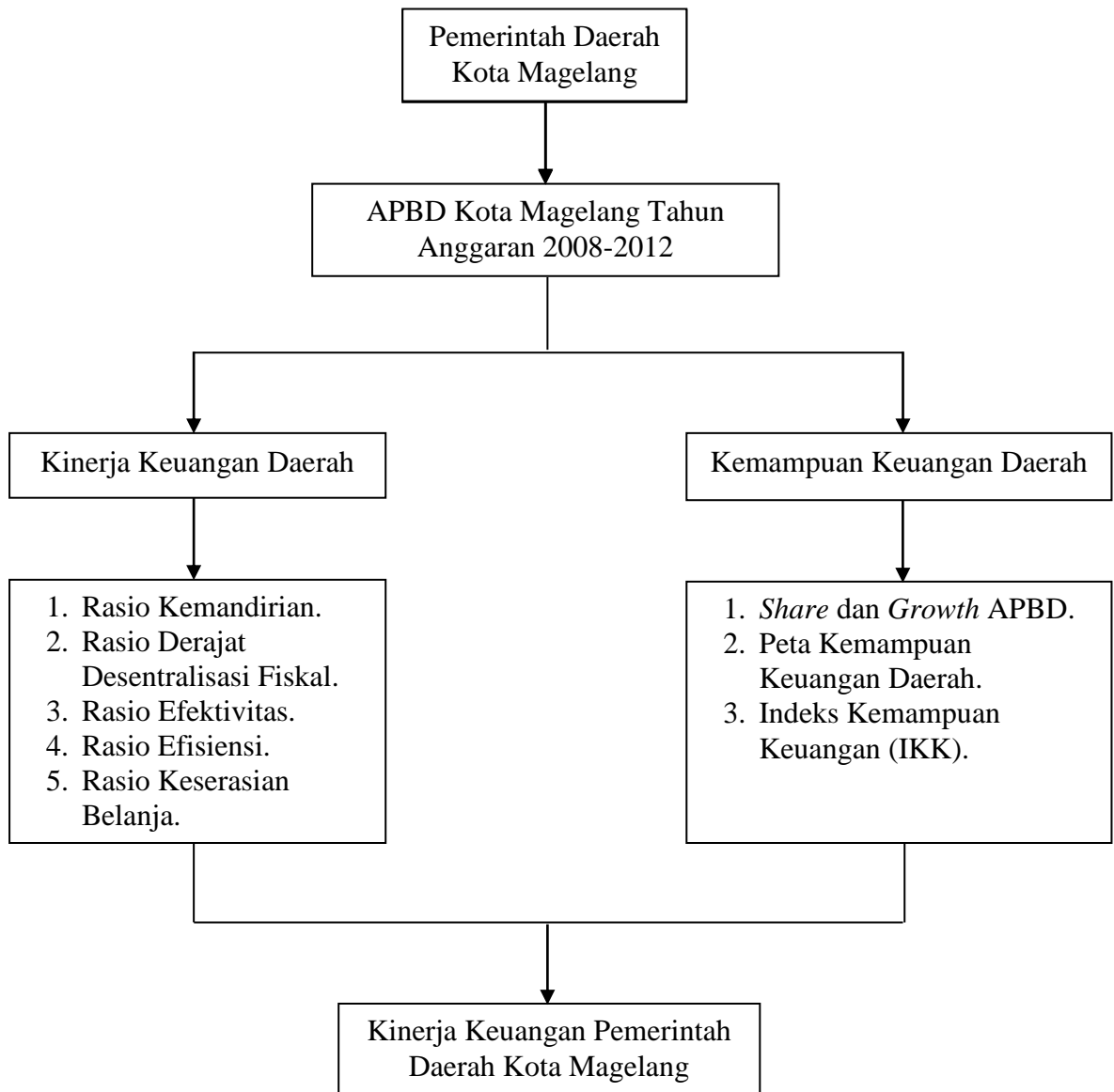
Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan anggaran biaya lebih untuk memperoleh hasil yang lebih. Setiap tahun kota Magelang melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki maupun menambah fasilitas umum. Pembangunan tersebut pastilah berpengaruh pada besarnya jumlah dana yang dikeluarkan. Besar kecilnya rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun dijadikan pembuktian apakah kinerja Pemerintah Daerah sudah sesuai atau belum, dilihat dari perkembangan daerah tersebut.

Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah Pemerintah Daerah mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan

analisa rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Analisis rasio tersebut dapat dijadikan tolok ukur apakah kinerja Pemerintah Daerah meningkat dari tahun ke tahunnya, sehingga dapat dikatakan sebagai daerah yang berkembang. Terlebih lagi banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui secara transparan mengenai besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, serta pengaruhnya terhadap ukuran kinerja Pemerintah Daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 dan akan dianalisis menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja, *Share* dan *Growth* APBD, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Di mana perhitungan analisis ini akan digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Magelang. Yang kemudian akan disimpulkan dengan cara melihat grafik perbandingan rasio-rasio dari setiap periode selama 5 (lima) tahun.



Gambar 2. Gambaran Kerangka Pemikiran.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan gambaran kerangka pemikiran di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah:

- a. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang selama Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012?
- b. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang selama Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012?
- c. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang selama Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012?
- d. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang selama Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012?
- e. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang selama Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012?

- f. Bagaimanakah Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang diukur melalui *Share* dan *Growth* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012?
- g. Bagaimanakah Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang diukur melalui Peta Kemampuan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012?
- h. Bagaimanakah Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang diukur melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2014.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Metode studi kasus (*case study*) adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, dimana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas (Yin, 1984a: 1984b, dalam Robert K. Yin, 2006: 18). Studi kasus dibatasi pada bukti kuantitatif.

Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan hasil perhitungan dan grafik Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun Anggaran 2008-2012. Kemudian dari grafik tersebut ditarik kesimpulan berkenaan dengan kinerja keuangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun Anggaran 2008-2012 yang didapatkan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang yang beralamat Jl. Sarwo Adiwibowo No. 2 Magelang Telp: (0293) 363530. Data tersebut merupakan dokumentasi dari Laporan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan (Jonathan Sarwono, 2006: 138).

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini antara lain :

- a. Menghitung rasio keuangan berdasarkan data yang diperoleh dengan membuat tabel.
- b. Membuat grafik dari hasil perhitungan rasio keuangan dari setiap periode.
- c. Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio keuangan atau dengan melihat grafiknya.

Dalam menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun Anggaran 2008-2012, rumus-rumus yang digunakan antara lain:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Kemandirian antara lain:

- a. Membuat tabel perkembangan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012.
- b. Menghitung Rasio Kemandirian dari tahun 2008-2012 dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\% \quad (11)$$

Tabel 7. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipasif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim, 2001 dalam Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu:

- a. Membuat tabel Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah.
- b. Menghitung Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (12)$$

Tabel 8. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991, dalam I Dewa Gde Bisma Dan Hery Susanto, 2010

3. Rasio Efektivitas

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Efektivitas yaitu:

- a. Membuat tabel biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dan realisasi penerimaan PAD.
- b. Menghitung Rasio Efektivitas dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \quad (13)$$

Tabel 9. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2010.

4. Rasio Efisiensi

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Efisiensi yaitu:

- c. Membuat table realisasi Penerimaan PAD dan target Penerimaan PAD.
- d. Menghitung Rasio Efisiensi dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \quad (14)$$

Tabel 10. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan(%)	Kriteria
Di atas 40	Tidak Efisien
31 – 40	Kurang Efisien
21 – 30	Cukup Efisien
10 – 20	Efisien
Di bawah 10	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi, 2010.

5. Rasio Keserasian Belanja

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Keserasian Belanja antara lain:

- a. Membuat tabel Total Belanja Langsung, Total Belanja Tidak Langsung, dan Total Belanja Daerah.

- b. Menghitung Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung dengan persamaan:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \quad (15)$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \quad (16)$$

6. Perhitungan *Share* dan *Growth*

Langkah-langkah dalam menganalisis *Share* dan *Growth* sebagai berikut:

- a. Membuat tabel Indeks Elastisitas Belanja Langsung terhadap PAD, Indeks Pertumbuhan PAD, dan Indeks Peran PAD.
- b. Menghitung *Share* dan *Growth* dengan persamaan:

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \quad (17)$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\% \quad (18)$$

Keterangan:

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah periode i-1

7. Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Langkah-langkah dalam menganalisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan hasil perhitungan *Share* dan *Growth* kuadran daerah tersebut dengan menggunakan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran.

- b. Mendeskripsikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan tabel klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran.

Tabel 11. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam Total Belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber : Bappenas, 2003

8. Menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Langkah-langkah untuk menganalisis Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) sebagai berikut:

- a. Menghitung indeks kemampuan keuangan dengan persamaan:

$$\text{Indeks X} = \frac{(\text{Nilai x Hasil Pengukuran}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})}{(\text{Nilai x Kondisi Maksimum}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})} \quad (19)$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka persamaan IKK dapat ditulis sebagai berikut:

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3} \quad (20)$$

Keterangan:

X_G = Indeks Pertumbuhan (PAD)

X_E = Indeks Elastisitas (Belanja Langsung Terhadap PAD)

X_S = Indeks *Share* (PAD terhadap APBD)

Tabel 12. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00-0,33	Rendah
0.34-0,43	Sedang
0,044-1,00	Tinggi

Sumber : Bappenas, 2003 dalam I Dewa Gde Bisma Dan Hery Susanto, 2010

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Magelang

1. Kondisi Geografis



Gambar 3. Peta Kota Magelang

Kota Magelang merupakan kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa dengan luas wilayah sebesar 18,12 km². Secara geografis Kota Magelang terletak pada 110°12'30"-110°12'52" Bujur Timur dan 7°26'28"-7°30'9" Lintang Selatan. Kota Magelang terletak pada posisi strategis, yaitu berada di persilangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo. Di samping berada pada

persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng dan dataran tinggi Dieng. Letak strategis Kota Magelang juga ditunjang dengan penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Secara topografis Kota Magelang merupakan dataran tinggi yang berada kurang dari lebih 380 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan berkisar antara 5° - 45° , sehingga Kota Magelang merupakan wilayah yang bebas banjir dengan ditunjang keberadaan Sungai Progo di sisi barat dan sungai Elo di sisi timur. Klimatologi Kota Magelang dikategorikan sebagai daerah beriklim basah dengan curah hujan yang cukup tinggi sebesar +7,10 mm/ th.

Secara administratif Kota Magelang terbagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo,
Kabupaten Magelang
- b. Sebelah timur : Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten
Magelang
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
- d. Sebelah barat : Sungai Progo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten
Magelang

2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang

a. VISI

Berdasarkan gambaran umum dan permasalahan pokok yang dihadapi Visi Kota Magelang Tahun 2010-2015 adalah "Terwujudnya Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang Maju, Profesional, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan. Adapun makna Visi Kota Magelang tersebut adalah :

1. Terwujudnya Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang maju, Bermodal dari kondisi dan letak geografis Kota Magelang yang strategis serta terciptanya pelayanan jasa dalam semua bidang (pendidikan, perdagangan, pariwisata, kesehatan, dsb) perlu peningkatan dan perbaikan penyediaan pelayanan jasa tersebut bagi masyarakat kota dan masyarakat daerah sekitar.
2. Profesional, Adalah kemampuan nyata pemerintah dalam rangka menciptakan pelayanan jasa secara efektif, efisien dan Sejahtera, Kesejahteraan masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya dapat tercipta dengan tercukupinya kebutuhan manusia meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja yang selanjutnya mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Magelang yang layak dan bermartabat.
3. Mandiri, Era global saat ini yang ditandai dengan pemberlakuan pasar bebas (WTO, AFTA, APEC, dsb) cepat atau lambat tentunya akan berdampak pada kondisi ketahanan ekonomi masyarakat, untuk itu perlu kiranya perkuatan dan peningkatan perekonomian kerakyatan dengan optimalisasi dari potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian.
4. Berkeadilan, Peningkatan pembangunan segala aspek secara merata dan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya yang ditujukan masyarakat berpenghasilan rendah serta peningkatan dan pengembangan paham kebangsaan dan kualitas keimanan dan ketaqwaan.

b. MISI

Berdasarkan Visi Kota Magelang tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kota Magelang Tahun 2010-2015 sebagai berikut:

1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsif apratur didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan.
2. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat.

3. Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian.
5. Mendorong peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi.
6. Mengembangkan paham kebangsaan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan guna mewujudkan rasa aman ketentraman masyarakat.

Sumber: <http://www.magelangkota.go.id/direktori/kategori/sekilas-kota/visi-dan-misi>

B. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Magelang

Salah satu cara untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan Analisis Rasio Keuangan. Untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, penulis tidak hanya melakukan Analisis Kinerja Keuangan Daerah, tetapi juga melakukan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah.

Dalam melakukan menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang, penulis menggunakan perhitungan dari data sekunder Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang merupakan salah satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang yang dibuat setiap tahunnya untuk disajikan secara transparan sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah. Untuk itu, evaluasi terhadap laporan keuangan sangat

diperlukan agar Pemerintah Daerah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

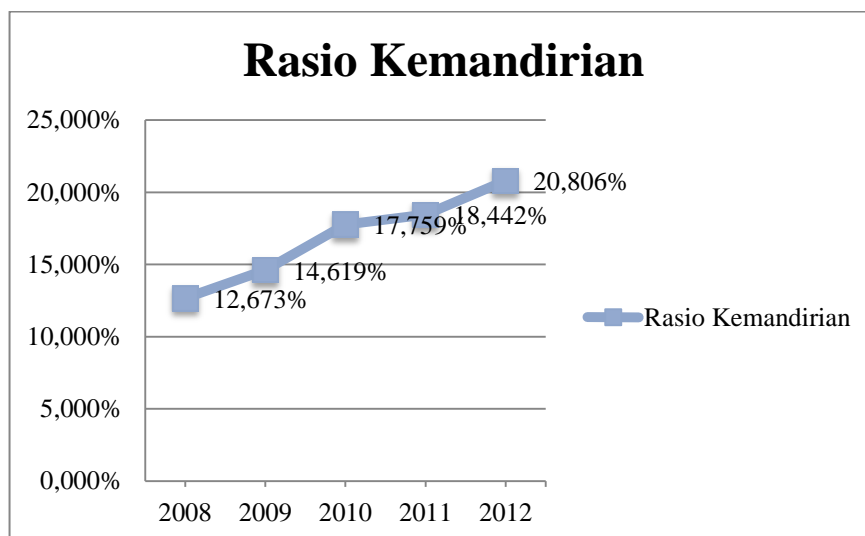
a. Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pinjaman dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012, maka Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rasio Kemandirian APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Bantuan Pemerintah dan Pinjaman	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2008	38.213.264.000	301.534.993.000	12,673%	Instruktif
2009	45.195.808.000	309.163.953.000	14,619%	Instruktif
2010	53.469.958.000	301.092.726.000	17,759%	Instruktif
2011	62.100.129.000	336.725.718.000	18,442%	Instruktif
2012	82.457.388.000	396.310.513.000	20,806%	Instruktif
Rata-rata Rasio Kemandirian			16,860%	Instruktif

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2010 (Data Diolah)



Gambar 4. Rasio Kemandirian APBD Kota Magelang Anggaran Tahun 2008-2012

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel dan grafik, Rasio Kemandirian Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa tahun 2008 realisasi PAD sebesar Rp 38.213.264.000 dan Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar Rp 301.534.993.000, sehingga Rasio Kemandirian Realisasi PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar 12,673%. Tahun 2009 Realisasi PAD sebesar Rp 45.195.808.000 dan Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar Rp 309.163.953.000, sehingga Rasio Kemandirian Realisasi PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar 14,619%. Tahun 2010 Realisasi PAD sebesar Rp 53.469.958.000 dan Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar Rp 301.092.726.000,

sehingga Rasio Kemandirian Realisasi PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar 17,759%. Tahun 2011 Realisasi PAD sebesar Rp 62.100.129.000 dan Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar Rp 336.725.718.000, sehingga Rasio Kemandirian realisasi PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar 18,422%. Tahun 2012 Realisasi PAD sebesar Rp Rp 82.457.388.000 dan Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar Rp 396.310.513.000, sehingga Rasio Kemandirian Realisasi PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar 20,806%. Jadi rata-rata Rasio Kemandirian Kota Magelang selama periode 5 tahun sebesar 16,860%. Dengan jumlah tersebut, menurut Kategori Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah yang dituliskan oleh Halim (2001), Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Magelang dikatakan sangat rendah sekali, sehingga masuk ke dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu berkisar antara 0%-25%. Dalam pola hubungan Instruktif, peran Pemerintah Pusat lebih dominan terhadap kemandirian Pemerintah Daerah.

Dapat dilihat dalam tabel 13, Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang memang mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih diikuti dengan tingginya dana bantuan dari Pemerintah Pusat. Dapat dikatakan Pemerintah Daerah Kota Magelang masih

sangat tergantung dengan bantuan dana dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang masih belum optimal dalam menggali potensi daerah Kota Magelang. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah juga masih rendah. Padahal pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah, serta menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat Kota Magelang juga ikut meningkat. Tidak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah pun juga ikut meningkat, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Magelang terhadap Pemerintah Pusat semakin berkurang.

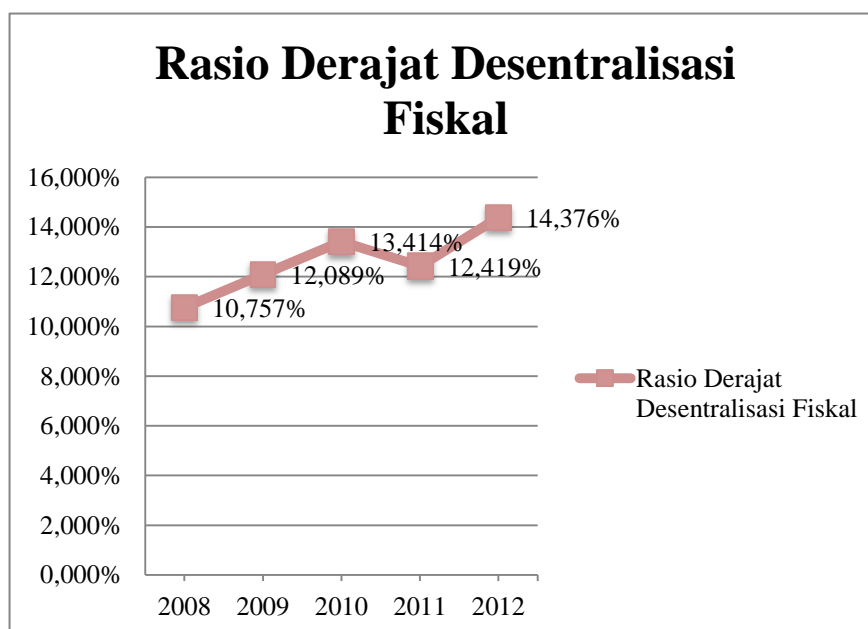
b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012, maka Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
2008	38.213.264.000	355.249.818.000	10,757%	Kurang
2009	45.195.808.000	373.851.427.000	12,089%	Kurang
2010	53.469.958.000	398.625.847.000	13,414%	Kurang
2011	62.100.129.000	500.060.494.000	12,419%	Kurang
2012	82.457.388.000	573.574.040.000	14,376%	Kurang
Rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal			12,611%	Kurang

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2010 (Data Diolah)



Gambar 5. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel dan grafik, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2011. Tahun 2011 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal mengalami penurunan sebesar

0,995%, kemudian tahun 2012 naik kembali sebesar 1,958%. Data tersebut secara rinci menunjukkan bahwa tahun 2008 Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 38.213.264.000 dan Total Pendapatan Daerah Rp 355.249.818.000, sehingga Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Realisasi Penerimaan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 10,757%. Tahun 2009 Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 45.195.808.000 dan Total Pendapatan Daerah Rp 373.851.427.000, sehingga Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Realisasi Penerimaan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 12,089%. Tahun 2010 Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 53.469.958.000 dan Total Pendapatan Daerah Rp 398.625.847.000, sehingga Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Realisasi Penerimaan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 13,414%. Tahun 2011 Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 62.100.129.000 dan Total Pendapatan Daerah Rp 500.060.494.000, sehingga Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Realisasi Penerimaan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 12,419%. Tahun 2012 Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 82.457.388.000 dan Total Pendapatan Daerah Rp 573.574.040.000, sehingga Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Realisasi Penerimaan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 14,376%. Jadi rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Magelang selama periode 5 tahun sebesar 12,611%.

Dengan jumlah tersebut, menurut Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal, Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kota Magelang dikatakan kurang. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil. Peningkatan PAD setiap periodenya menunjukkan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Magelang. Akan tetapi, ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat tergolong besar. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, serta peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri kurang dari 20%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi.

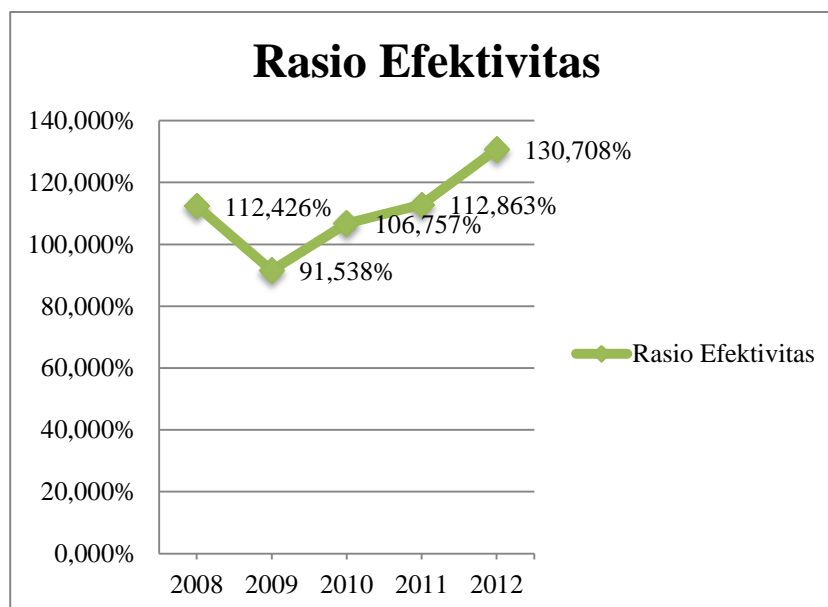
c. Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan normatif data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Potensi Riil Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012, maka Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rasio Efektivitas APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012
(Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah	Rasio Efektivitas	Kriteria Rasio Efektivitas
2008	8.213.264.000	33.989.756.000	112,426%	Sangat Efektif
2009	45.195.808.000	49.373.992.000	91,538%	Cukup Efektif
2010	53.469.958.000	50.085.652.000	106,757%	Sangat Efektif
2011	62.100.129.000	55.022.599.000	112,863%	Sangat Efektif
2012	82.457.388.000	63.085.389.000	130,708%	Sangat Efektif
Rata-rata Rasio Efektivitas			110,858%	Sangat Efektif

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2010 (Data Diolah)



Gambar 6. Rasio Efektivitas APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012

Dilihat dari data yang tercantum dalam tabel dan grafik, Rasio Efektivitas Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahun 2012 pada awal periode, yaitu tahun 2008 Rasio Efektivitas tergolong tinggi. Kemudian di tahun berikutnya, yaitu tahun 2009, Rasio Efektivitasnya turun sebesar 20,888%. Setelah itu, pada tahun 2010 Rasio Efektivitas mengalami kenaikan

kembali sebesar 15,219% dan kenaikan tersebut terus terjadi pada periode-periode selanjutnya. Data tersebut secara rinci menunjukkan bahwa tahun 2008 Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 38.213.264.000 dan Target Penerimaan Berdasarkan Potensi Riil Daerah Rp 33.989.756.000, sehingga Rasio Efektivitas Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target Penerimaan Berdasarkan Potensi Riil Daerah sebesar 112,426%. Tahun 2009 Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 45.195.808.000 dan Target Penerimaan Berdasarkan Potensi Riil Daerah Rp 49.373.992.000, sehingga Rasio Efektivitas Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target Penerimaan Berdasarkan Potensi Riil Daerah sebesar 91,538%. Tahun 2010 Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 53.469.958.000 dan Target Penerimaan Berdasarkan Potensi Riil Daerah Rp 50.085.652.000, sehingga Rasio Efektivitas Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target Penerimaan Berdasarkan Potensi Riil Daerah sebesar 106,757%. Tahun 2011 Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 62.100.129.000 dan Target Penerimaan Berdasarkan Potensi Riil Daerah Rp 55.022.599.000, sehingga Rasio Efektivitas Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target Penerimaan Berdasarkan Potensi Riil Daerah sebesar 112,863%. Tahun 2012 Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 82.457.388.000 dan Target Penerimaan Berdasarkan Potensi Riil Daerah Rp 63.085.389.000, sehingga Rasio Efektivitas Realisasi Penerimaan

PAD terhadap Target Penerimaan Berdasarkan Potensi Riil Daerah sebesar 130,708%. Dari keseluruhan, hampir semua periode tingkat efektivitasnya dikatakan sangat efektif, kecuali tahun 2009 yang tingkat efektivitasnya hanya termasuk dalam kriteria cukup efektif. Rata-rata Rasio Efektivitas Kota Magelang selama periode 5 tahun sebesar 110,858%. Dengan jumlah tersebut, menurut kriteria Rasio Efektivitas, tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kota Magelang dikatakan Sangat Efektif. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik.

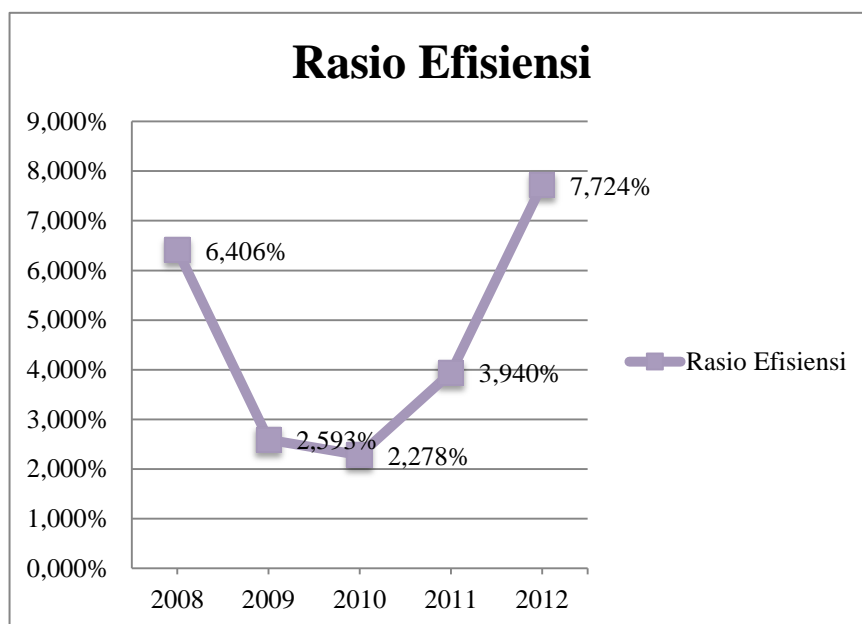
d. Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012, maka Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rasio Efisiensi APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi	Kriteria Rasio Efisiensi
2008	2.448.000.000	38.213.264.000	6,406%	Sangat Efisien
2009	1.172.000.000	45.195.808.000	2,593%	Sangat Efisien
2010	1.218.000.000	53.469.958.000	2,278%	Sangat Efisien
2011	2.447.000.000	62.100.129.000	3,940%	Sangat Efisien
2012	6.369.000.000	82.457.388.000	7,724%	Sangat Efisien
Rata-rata Rasio Efisiensi			4,588%	Sangat Efisien

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2010 (Data Diolah)



Gambar 7. Rasio Efisiensi APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012

Dilihat dari data yang tercantum dalam tabel dan grafik, Rasio Efisiensi Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahun 2012, pada awal periode hingga pertengahan periode, yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Rasio Efisiensi mengalami penurunan sebesar 3,813% dan 0,315%, tetapi pada

periode selanjutnya, yaitu tahun 2011 sampai dengan 2012 Rasio Efisiensi mengalami kenaikan sebesar 1,66% dan 3,78%. Tetapi seluruh Rasio Efektivitas masih termasuk dalam golongan sangat efisien, karena berada di bawah batas minimal, yaitu kurang dari 10%. Data tersebut secara rinci menunjukkan bahwa tahun 2008 Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD sebesar Rp 2.448.000.000 dan Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 38.213.264.000, sehingga Rasio Efisiensi Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD terhadap Realisasi Penerimaan PAD sebesar 6,406%. Tahun 2009 Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD sebesar Rp 1.172.000.000 dan Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 45.195.808.000, sehingga Rasio Efisiensi Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD terhadap Realisasi Penerimaan PAD sebesar 2,593%. Tahun 2010 Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD sebesar Rp 1.218.000.000 dan Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 53.469.958.000, sehingga Rasio Efisiensi Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD terhadap Realisasi Penerimaan PAD sebesar 2,278%. Tahun 2011 Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD sebesar Rp 2.447.000.000 dan Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 62.100.129.000, sehingga Rasio Efisiensi Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD terhadap Realisasi Penerimaan PAD sebesar 3,940%. Tahun 2012 Biaya

Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD sebesar Rp 6.369.000.000 dan Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 82.457.388.000, sehingga Rasio Efisiensi Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD terhadap Realisasi Penerimaan PAD sebesar 7,724%. Rata-rata Rasio Efisiensi Kota Magelang selama periode 5 tahun sebesar 4,588%. Dengan jumlah tersebut, menurut kriteria Rasio Efisiensi, tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kota Magelang dikatakan Sangat Efisien. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik.

e. Rasio Keserasian Belanja

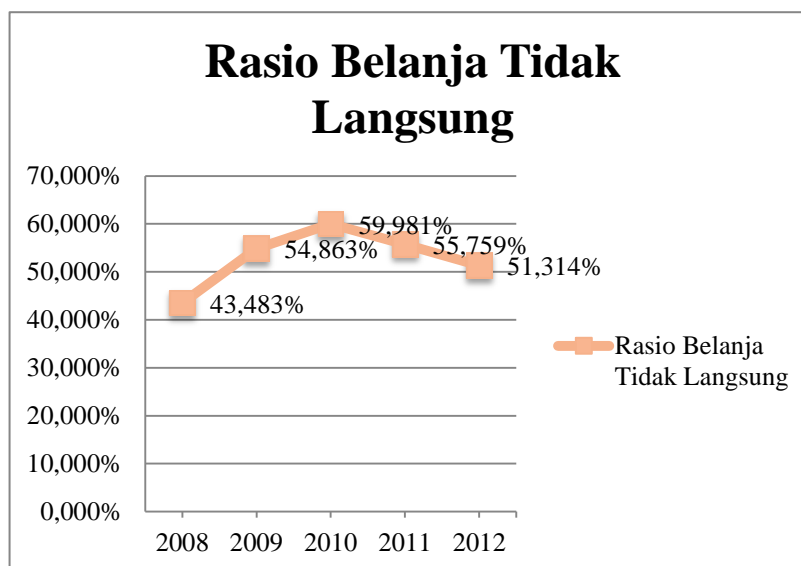
1) Rasio Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Total Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012, maka Rasio Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rasio Belanja Tidak Langsung APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Tidak Langsung
2008	200.559.288.000	461.238.208.000	43,483%
2009	249.397.438.000	454.584.411.000	54,863%
2010	267.740.619.000	446.372.198.000	59,981%
2011	300.085.017.000	538.185.928.000	55,759%
2012	329.453.768.000	642.032.128.000	51,314%
Rata-rata Rasio Belanja Tidak Langsung			53,080%

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2010 (Data Diolah)



Gambar 8. Rasio Belanja Tidak Langsung APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012

Dilihat dari data yang tercantum dalam tabel dan grafik, Rasio Belanja Tidak Langsung Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahun 2012, pada awal periode hingga pertengahan periode, yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Rasio Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar 11,380% dan 5,119%, tetapi pada periode

selanjutnya, yaitu tahun 2011 sampai dengan 2012, Rasio Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan sebesar 4,223% dan 4,444%. Data tersebut secara rinci menunjukkan bahwa tahun 2008 Total Belanja Tidak Langsung Rp 200.559.288.000 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 461.238.208.000, sehingga Rasio Belanja Tidak Langsung Total Belanja Tidak Langsung Biaya terhadap Total Belanja Daerah sebesar 43,483%. Tahun 2009 Total Belanja Tidak Langsung Rp 249.397.438.000 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 454.584.411.000, sehingga Rasio Belanja Tidak Langsung Total Belanja Tidak Langsung Biaya terhadap Total Belanja Daerah sebesar 54,863%. Tahun 2010 Total Belanja Tidak Langsung Rp 267.740.619.000 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 446.372.198.000, sehingga Rasio Belanja Tidak Langsung Total Belanja Tidak Langsung Biaya terhadap Total Belanja Daerah sebesar 59,981%. Tahun 2011 Total Belanja Tidak Langsung Rp 300.085.017.000 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 538.185.928.000, sehingga Rasio Belanja Tidak Langsung Total Belanja Tidak Langsung Biaya terhadap Total Belanja Daerah sebesar 55,759%. Tahun 2012 Total Belanja Tidak Langsung Rp 329.453.768.000 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 642.032.128.000, sehingga Rasio Belanja Tidak Langsung Total Belanja Tidak Langsung Biaya terhadap Total

Belanja Daerah sebesar 51,314%. Rata-rata Rasio Belanja Tidak Langsung Kota Magelang selama periode 5 tahun sebesar 53,080%. Ini menunjukkan bahwa, Pemerintah Daerah Kota Magelang lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan untuk Belanja Langsung.

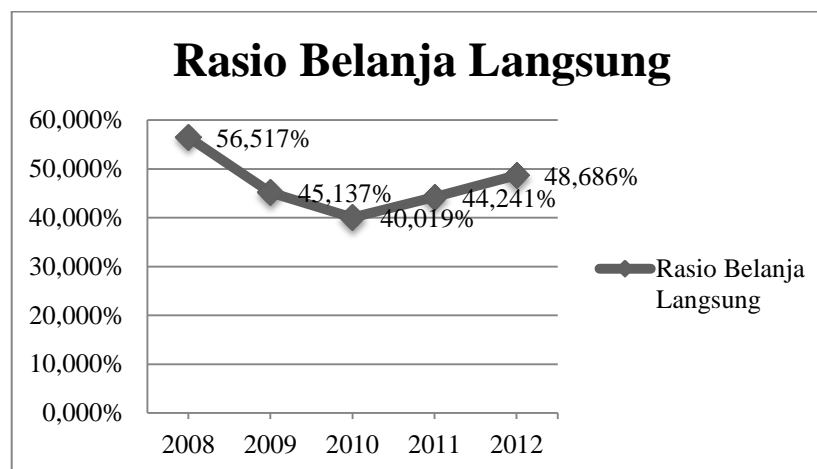
2) Rasio Belanja Langsung

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Total Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012, maka Rasio Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rasio Belanja Langsung APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Total Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Langsung
2008	260.678.920.000	461.238.208.000	56,517%
2009	205.186.973.000	454.584.411.000	45,137%
2010	178.631.579.000	446.372.198.000	40,019%
2011	238.100.911.000	538.185.928.000	44,241%
2012	12.578.360.000	642.032.128.000	48,686%
Rata-rata Rasio Belanja Langsung			46,920%

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2010 (Data Diolah)



Gambar 9. Rasio Belanja Langsung APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012

Dilihat dari data yang tercantum dalam tabel dan grafik Rasio Belanja Langsung Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahun 2012, pada awal periode hingga pertengahan periode, yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Rasio Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar 11,380% dan 5,119%, tetapi pada periode selanjutnya, yaitu tahun 2011 sampai dengan 2012, Rasio Belanja Langsung mengalami kenaikan sebesar 4,223% dan 4,444%. Data tersebut secara rinci menunjukkan bahwa tahun 2008 Total Belanja Langsung Rp 260.678.920.000 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 461.238.208.000, sehingga Rasio Belanja Langsung Total Belanja Langsung Biaya terhadap Total Belanja Daerah sebesar 56,517%. Tahun 2009 Total Belanja Langsung Rp 205.186.973.000 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 454.584.411.000, sehingga Rasio Belanja

Langsung Total Belanja Langsung Biaya terhadap Total Belanja Daerah sebesar 45,137%. Tahun 2010 Total Belanja Langsung Rp 178.631.579.000 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 446.372.198.000, sehingga Rasio Belanja Langsung Total Belanja Langsung Biaya terhadap Total Belanja Daerah sebesar 40,019%. Tahun 2011 Total Belanja Langsung Rp 238.100.911.000 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 538.185.928.000, sehingga Rasio Belanja Langsung Total Belanja Langsung Biaya terhadap Total Belanja Daerah sebesar 44,241%. Tahun 2012 Total Belanja Langsung Rp 312.578.360.000 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 642.032.128.000, sehingga Rasio Belanja Langsung Total Belanja Langsung Biaya terhadap Total Belanja Daerah sebesar 48,686%. Rata-rata Rasio Belanja Tidak Langsung Kota Magelang selama periode 5 tahun sebesar 46,920%. Ini berarti Pemerintah Daerah Kota Magelang lebih sedikit menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Langsung dibandingkan untuk Belanja Tidak Langsung.

Dilihat dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan kegiatan Belanja Langsung. Semestinya

Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung. Kedua rasio tersebut selisih 6,160%, berarti Pemerintah Daerah seharusnya bisa meningkatkan Belanja Langsung agar kualitas *outputnya* meningkat, agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik

2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

a. Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth*.

1) *Share*

Tabel 19. *Share* APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	PAD	Total Belanja	Nilai
2008	38.213.264.000	461.238.208.000	8,285%
2009	45.195.808.000	454.584.411.000	9,942%
2010	53.469.958.000	446.372.198.000	11,979%
2011	62.100.129.000	538.185.928.000	11,539%
2012	82.457.388.000	642.032.128.000	12,843%
Rata-rata <i>Share</i>			10,918%

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2010 (Data Diolah)

2) *Growth*Tabel 20. *Growth* APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	<i>Growth</i>
2008	38.213.264.000	-
2009	45.195.808.000	647,269%
2010	53.469.958.000	646,229%
2011	62.100.129.000	719,570%
2012	82.457.388.000	405,052%
Rata-rata <i>Growth</i>		604,530%

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2010 (Data Diolah)

b. Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Dari hasil perhitungan *Share* dan *Growth* terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012, maka diperoleh data *Share* sebesar 10,918% dan *Growth* sebesar 604,530% kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran, posisi Kota Magelang berada pada kuadran II, yaitu Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpotensi memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Ini berarti Pemerintah Daerah Kota Magelang masih dapat menggali potensi daerah lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

Magelang memiliki destinasi wisata yang banyak diminati masyarakat, sehingga banyak sekali pelayanan jasa yang dibangun di Kota Magelang, seperti jasa perhotelan, swalayan, hingga jasa parkir. Jika dapat mengelola potensi daerah yang ada, Pemerintah Daerah Kota Magelang dapat meningkatkan kinerjanya untuk menambah PAD pada periode selanjutnya. Kota Magelang sendiri terkenal dengan sebutan sebagai Kota Jasa, hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi yang didapatkan dari pembayaran pelayanan penjualan jasa di Kota Magelang. Karena pajak dan retribusi merupakan pemberi kontribusi utama dalam meningkatkan PAD.

c. Menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

1) Indeks Elastisitas

Indeks Elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja langsung bertujuan untuk melihat elastisitas atau sensitivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah perhitungan Indeks Elastisitas Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012:

Tabel 21. Indeks Elastisitas APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Nilai (%)	Kondisi Maksimal (%)	Kondisi Minimal (%)	Indeks (%)
2008	0,146591309	0,299330937	0,146591309	0,000
2009	0,220266459	0,299330937	0,146591309	0,482
2010	0,299330937	0,299330937	0,146591309	1,000
2011	0,260814328	0,299330937	0,146591309	0,748
2012	0,263797494	0,299330937	0,146591309	0,767
Jumlah				2,998

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2010 (Data Diolah)

$$X_e = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n} = \frac{2,998}{5} = 0,600$$

2) Indeks *Share*

Indeks *Share* PAD terhadap Total belanja memperlihatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan Biaya Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Berikut ini adalah perhitungan Indeks *Share* Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012:

Tabel 21. Indeks *Share* APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Nilai (%)	Kondisi Maksimal (%)	Kondisi Minimal (%)	Indeks (%)
2008	0,082849303	0,128431872	0,082849303	0,000
2009	0,099422257	0,128431872	0,082849303	0,364
2010	0,119787832	0,128431872	0,082849303	0,810
2011	0,115387872	0,128431872	0,082849303	0,714
2012	0,128431872	0,128431872	0,082849303	1,000
Jumlah				2,888

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2010 (Data Diolah)

$$X_s = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n \text{ tahun}} = \frac{2,888}{5} = 0,578$$

3) Indeks *Growth*

Perhitungan Indeks *Growth* memperlihatkan bagaimana pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah perhitungan Indeks *Growth* Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012:

Tabel 20. Indeks *Growth* APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kondisi Maksimal (Rp)	Kondisi Minimal (Rp)	Indeks (%)
2008	38.213.264.000	82.457.388.000	38.213.264.000	0,000
2009	45.195.808.000	82.457.388.000	38.213.264.000	0,158
2010	53.469.958.000	82.457.388.000	38.213.264.000	0,345
2011	62.100.129.000	82.457.388.000	38.213.264.000	0,540
2012	82.457.388.000	82.457.388.000	38.213.264.000	1,000
Jumlah				2,043

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2010 (Data Diolah)

$$X_g = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n \text{ tahun}} = \frac{2,043}{5} = 0,409$$

4) Indeks Kemampuan Keuangan

$$IKK = \frac{XE + XG + XS}{3}$$

$$IKK = \frac{0,600 + 0,409 + 0,578}{3}$$

$$IKK = \frac{1,586}{3} = 0,529$$

Dilihat dari hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012, skala indeks menunjukkan angka 0,529. Ini berarti Kemampuan Keuangan Kota Magelang tergolong tinggi. Artinya, tingginya tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang tercantum pada Analisis Rasio Kemandirian yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang memiliki tingkat kemandirian yang sangat rendah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan normatif dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Kota Magelang berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Ini terlihat dari hasil rata-rata Rasio Kemandirian Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012, berdasarkan pengolahan data yang berasal dari Ringkasan Laporan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 adalah sebesar 16,860%. Ini menunjukkan bahwa, peran Pemerintah Pusat sangat dominan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang. Mengingat peran Pemerintah Pusat yang masih sangat dominan, wajar jika Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kota Magelang masih kurang. Ini terlihat dari rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama periode 5 tahun hanya berjumlah 12,611%. Artinya,

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang kecil kepada Pemerintah Daerah Kota Magelang. Namun, tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang terbilang sangat efektif dan sangat efisien. Ini terlihat dari tingginya angka rata-rata Rasio Efektivitas yang berjumlah 110,858% dan rendahnya angka rata-rata Rasio Efisiensi yang berjumlah 4,588% selama periode 5 tahun anggaran. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa keseimbangan antar belanja belum seimbang. Terbukti dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan kegiatan Belanja Langsung. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.

2. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Magelang masih belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan *share* dan *growth* terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012, maka diperoleh data *Share* sebesar 10,918% dan *Growth* sebesar 604,530%, sehingga posisi Kota Magelang berada pada kuadran II yang berarti berada pada kondisi belum ideal. Tandanya, Pemerintah Daerah Kota Magelang masih harus

menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki daerah, sehingga lebih dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD. Dilihat dari hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kota Magelang selama periode 5 tahun, skala indeks menunjukkan angka 0,528525 yang berarti kemampuan keuangan Kota Magelang tergolong tinggi. Tingginya tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang ditunjukkan pada analisis rasio kemandirian. Hal ini sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya.

B. Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil perhitungan normatif dan analisis pada Bab IV, maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki oleh Kota Magelang, karena mempunyai dampak yang besar, tidak hanya bagi Pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat. Potensi tersebut antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, hingga perdagangan. Jika Pemerintah berhasil memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut

secara maksimal, maka pajak yang merupakan penopang utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah hendaklah memberi informasi secara rinci kepada masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai pembayar pajak dan retribusi, karena tidak semua masyarakat mengetahui rincian kewajiban jumlah pajak dan retribusi yang harus dibayarkan. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi supaya tidak terjadi kecurangan. Karena besarnya pajak dan retribusi tidak hanya sebagai komponen utama untuk meningkatkan PAD, tetapi juga sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Dilihat dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja secara normatif, keseimbangan antar belanja belum menunjukkan kata seimbang. Pemerintah Daerah seharusnya lebih cenderung menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal untuk meningkatkan kualitas *output*, sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik. Pemerintah Daerah Kota Magelang harus mengurangi ketergantungan terhadap dana bantuan dari Pemerintah Pusat, agar dapat mencapai kondisi tingkat kemampuan keuangan yang ideal. Caranya, dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk mengurangi besarnya dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah M, Nur & Yuyun Wiendyawati. (2012). *Analisis PDRB Kota Magelang Tahun 2013*, Magelang: Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
- Andita Puspita Wardhani. (2011). “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005-2010*”. *Skripsi*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina. (2011). “*Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009*”. *Skripsi*. Institut Manajemen Telkom Bandung.
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bisma, I Dewa Gde & Hery Susanto. (2010). “*Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007*”. *Jurnal*. GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Mataram.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Martani, Dwi. (2011). PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan Revisi 2013. Departemen Akuntansi FE UI. Diakses dari <http://staff.blog.ui.ac.id/martani> pada 8 September 2014 jam 10.30 WIB.

Menteri Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pemerintah Kota. Visi dan Misi Kota Magelang. Diakses dari <http://www.magelangkota.go.id/direktori/kategori/sekilas-kota/visi-dan-misi> pada 30 Juni 2014, jam 07.22 WIB.

Republik Indonesia. 1975. Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*.

_____. 1975. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1975. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*.

Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian kuantitatif & kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Ulum, Ihyahul. (2009). *Audit Sektor Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yin, Robert K. (2006). *Studi Kasus-Desain & Metode*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks Elastisitas APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	PAD	Total Belanja Langsung	Nilai (%)	Kondisi Maksimal (%)	Kondisi Minimal (%)	Indeks (%)	Rata-rata Indeks Elastisitas
2008	Rp 38.213.264.000	Rp 260.678.920.000	0,146591309	0,299330937	0,146591309	0,000	
2009	Rp 45.195.808.000	Rp 205.186.973.000	0,220266459	0,299330937	0,146591309	0,482	
2010	Rp 53.469.958.000	Rp 178.631.579.000	0,299330937	0,299330937	0,146591309	1,000	
2011	Rp 62.100.129.000	Rp 238.100.911.000	0,260814328	0,299330937	0,146591309	0,748	
2012	Rp 82.457.388.000	Rp 312.578.360.000	0,263797494	0,299330937	0,146591309	0,767	
Jumlah						2,998	0,600

Lampiran 2. Indeks *Growth* APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	<i>Growth</i>	Kondisi Maksimal (Rp)	Kondisi Minimal (Rp)	Indeks (%)
2008	Rp 38.213.264.000	0,000%	Rp 82.457.388.000	Rp 38.213.264.000	0,000
2009	Rp 45.195.808.000	647,269%	Rp 82.457.388.000	Rp 38.213.264.000	0,158
2010	Rp 53.469.958.000	646,229%	Rp 82.457.388.000	Rp 38.213.264.000	0,345
2011	Rp 62.100.129.000	719,570%	Rp 82.457.388.000	Rp 38.213.264.000	0,540
2012	Rp 82.457.388.000	405,052%	Rp 82.457.388.000	Rp 38.213.264.000	1,000
	Jumlah	2418,119%		Jumlah	2,043
	Rata-rata	604,530%		Rata-rata	0,409

Lampiran 3. Indeks *Share* APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	PAD	Total Belanja	Share	Nilai (%)	Kondisi Maksimal (%)	Kondisi Minimal (%)	Indeks (%)
2008	Rp 38.213.264.000	Rp 461.238.208.000	8,285%	0,082849303	0,128431872	0,082849303	0,000
2009	Rp 45.195.808.000	Rp 454.584.411.000	9,942%	0,099422257	0,128431872	0,082849303	0,364
2010	Rp 53.469.958.000	Rp 446.372.198.000	11,979%	0,119787832	0,128431872	0,082849303	0,810
2011	Rp 62.100.129.000	Rp 538.185.928.000	11,539%	0,115387872	0,128431872	0,082849303	0,714
2012	Rp 82.457.388.000	Rp 642.032.128.000	12,843%	0,128431872	0,128431872	0,082849303	1,000
Jumlah			54,588%	0,545879136	Jumlah		2,888
Rata-rata			10,918%	0,109175827	Rata-rata		0,578